

Peran Perencanaan Partisipatif dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman Padat Penduduk

Sutiani¹, Muhammad Ade Kurnia Harahap², Sarintan Efratani Damanik³

^{1,2,3}Universitas Simalungun, Indonesia

E-mail: sutianiani1604@gmail.com¹, adekur2000@gmail.com², damaniksarintan@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 23 Oktober 2025

Accepted: 24 Oktober 2025

Keywords: Perencanaan Partisipatif, Efektivitas Pengelolaan Sampah, Permukiman Padat Penduduk

Abstract: Pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk merupakan tantangan penting bagi tata kelola lingkungan perkotaan di Indonesia, terutama akibat tingginya volume sampah, keterbatasan lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis peran perencanaan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari 50 artikel awal melalui Google Scholar dan website kredibel pada periode 1969–2025, kemudian diseleksi ketat hingga tersisa 23 artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah, perumusan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi program, terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, serta memperkuat modal sosial dan inovasi lokal seperti bank sampah. Teori Ladder of Citizen Participation, Collaborative Planning Theory, dan Community-Based Natural Resource Management menjadi kerangka konseptual utama yang menjelaskan keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan program. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah ditentukan oleh kualitas kolaborasi dan partisipasi warga dalam perencanaan. Temuan ini dapat menjadi krusial bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan di permukiman padat penduduk.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk telah menjadi

tantangan besar dalam tata kelola lingkungan perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah perkotaan menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan, sementara kapasitas pemerintah daerah dalam mengelolanya sering kali tidak sebanding. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, timbulan sampah nasional Indonesia mencapai 68,7 juta ton per tahun. Sebanyak 38,28% dari jumlah tersebut bersumber dari rumah tangga (Admin, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh minimnya lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA), rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, dan lemahnya sistem pengangkutan serta pengolahan. Di kawasan permukiman padat penduduk, masalah tersebut menjadi semakin kompleks karena keterbatasan ruang fisik dan tingginya intensitas aktivitas manusia yang menghasilkan sampah setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memunculkan berbagai dampak seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, pendekatan top-down yang hanya mengandalkan kebijakan pemerintah sering kali tidak efektif dalam mengatasi persoalan sampah di tingkat lokal. Hal ini karena pengelolaan sampah bergantung pada perilaku, partisipasi, dan kesadaran masyarakat. Maka, muncul kebutuhan akan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang menjadi produsen dan pengelola sampah di tingkat rumah tangga. Melalui perencanaan partisipatif, masyarakat menjadi subjek aktif yang memiliki peran dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan sampah (Halimah et al., 2015; Sitoresmi & Karmilah, 2025). Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta memastikan keberlanjutan program. Dalam praktiknya, partisipasi ini dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah lingkungan, penyusunan rencana kebersihan kampung, hingga kegiatan gotong royong dalam pengelolaan bank sampah dan daur ulang.

Perencanaan partisipatif sendiri berakar pada paradigma pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan pentingnya kolaborasi horizontal antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Teori partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969) dalam "*Ladder of Citizen Participation*" menjelaskan bahwa partisipasi sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan publik, bukan sekadar diundang sebagai simbol keterlibatan. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini berarti masyarakat dilibatkan sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan strategi, implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi. Model ini mampu menciptakan kebijakan yang lebih kontekstual, karena didasarkan pada pengetahuan lokal dan kebutuhan nyata di lapangan. Di banyak daerah, inisiatif seperti pembentukan bank sampah, sistem pemilahan berbasis RT/RW, dan kelompok sadar lingkungan terbukti lebih berhasil ketika lahir dari proses partisipatif ketimbang program pemerintah yang bersifat instruktif.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan partisipatif masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Dalam banyak kasus, proses partisipasi hanya bersifat formalitas atau tokenisme, di mana masyarakat dilibatkan secara terbatas tanpa memiliki ruang nyata untuk memengaruhi keputusan (Indrawati, 2019). Hal ini sering disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan warga, rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami isu teknis pengelolaan sampah, serta minimnya fasilitas yang mendukung partisipasi aktif seperti forum komunikasi lingkungan atau lembaga pengelola berbasis komunitas. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat di kawasan padat penduduk yang sebagian besar berpenghasilan rendah juga menjadi hambatan karena prioritas utama

mereka lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar ketimbang keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Di sisi lain, perencanaan partisipatif yang berhasil terbukti mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, murah, dan berkelanjutan. Contohnya dapat dilihat pada program “Kampung Iklim” (ProKlim) yang diinisiasi oleh KLHK, di mana peran aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah menghasilkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pengumpulan dan pengolahan sampah rumah tangga. Selain itu, keberhasilan bank sampah di Kota Bandung dan Sukoharjo juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program lingkungan (Setyawati et al., 2025; Tumimomor & Lasso, 2024) . Melalui mekanisme perencanaan partisipatif, warga dapat menentukan jadwal pengumpulan, mekanisme pemilahan, hingga skema insentif yang paling sesuai dengan kondisi lokal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah ditentukan oleh kualitas interaksi sosial dan kolaborasi antar pihak.

Efektivitas pengelolaan sampah dalam konteks permukiman padat penduduk juga tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola lingkungan yang inklusif. Prinsip *good governance*—yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas—menjadi landasan esensial untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Dewi et al., 2025) . Melalui perencanaan partisipatif, warga dapat turut mengawasi jalannya kebijakan dan penggunaan dana lingkungan, sehingga mencegah praktik-praktik birokratis yang tidak efisien. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memperkuat keadilan sosial karena setiap kelompok, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kebutuhan dan gagasannya. Dalam konteks permukiman padat seperti di Jakarta, Medan, atau Surabaya, pendekatan ini dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah kota dan realitas sosial di tingkat lokal.

Secara teoritis, hubungan antara perencanaan partisipatif dan efektivitas pengelolaan sampah dapat dijelaskan melalui *Collaborative Planning Theory* (Healey, 1997) . Teori ini menekankan bahwa perencanaan yang kolaboratif mampu menghasilkan keputusan yang lebih legitimate dan implementatif karena didasarkan pada dialog dan kesepahaman antaraktor. Ketika warga, pemerintah, dan sektor swasta berkolaborasi dalam proses perencanaan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih kontekstual dan mendapat dukungan luas dari masyarakat (Fonataba, 2025; Hakim & Umar, 2025) . Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah diukur dari meningkatnya kapasitas sosial masyarakat, kesadaran ekologis, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi kritis terhadap sejauh mana perencanaan partisipatif telah diterapkan secara efektif dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk. Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada hasil akhir, seperti tingkat pengurangan sampah atau jumlah bank sampah yang terbentuk, tanpa menggali bagaimana proses partisipatif itu sendiri memengaruhi efektivitas pengelolaan. Dengan kata lain, belum banyak kajian yang menelaah hubungan sebab-akibat antara kualitas partisipasi dan tingkat keberhasilan program lingkungan. Hal ini membuka ruang penting bagi penelitian tinjauan pustaka untuk mengkaji bagaimana berbagai model perencanaan partisipatif telah diimplementasikan di berbagai daerah dan faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis peran perencanaan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk, dengan menganalisis berbagai pendekatan, praktik terbaik, dan tantangan yang ditemukan dalam literatur. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor lain dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di lingkungan perkotaan yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis deskriptif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik “Peran Perencanaan Partisipatif dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman Padat Penduduk.” Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep, makna, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif serta efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan hasil kajian literatur, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menafsirkan dan memaparkan hasil temuan dari berbagai sumber secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di Google Scholar dan beberapa website kredibel seperti portal resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan isu pengelolaan sampah, perencanaan partisipatif, dan pembangunan berkelanjutan. Periode pengumpulan data dibatasi antara tahun 1969 hingga 2025 untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis mencerminkan perkembangan terbaru dalam teori, kebijakan, dan praktik pengelolaan lingkungan di konteks urban modern.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti “perencanaan partisipatif,” “pengelolaan sampah,” “permukiman padat penduduk,” “*community-based waste management*,” dan “partisipasi masyarakat dalam lingkungan.” Dari proses penelusuran awal tersebut, diperoleh sebanyak 50 artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Kedua, dilakukan seleksi ketat berdasarkan kriteria inklusi seperti kesesuaian topik, kelengkapan metodologi, validitas akademik, dan relevansi terhadap konteks permukiman padat penduduk di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Artikel yang bersifat opini, duplikasi, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu partisipatif kemudian dikeluarkan dari daftar.

Setelah melalui proses seleksi tersebut, hanya 23 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria akhir dan digunakan sebagai sumber utama dalam analisis. Artikel-artikel ini mencakup hasil penelitian empiris, laporan kebijakan, serta tinjauan konseptual yang menyoroti praktik perencanaan partisipatif dan pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Tahap berikutnya adalah analisis deskriptif, di mana setiap artikel dibaca dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti model perencanaan partisipatif, tingkat keterlibatan masyarakat, efektivitas program pengelolaan sampah, hambatan implementasi, serta faktor keberlanjutan.

Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari setiap artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hubungan antar variabel dan kecenderungan temuan dalam literatur. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan pola-pola yang muncul dari berbagai studi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran perencanaan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk pengelolaan lingkungan dan sampah di kawasan padat penduduk. Menurut *Ladder of Citizen Participation* oleh Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dibagi menjadi delapan tingkat, mulai dari manipulasi hingga kontrol penuh masyarakat, di mana semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula pengaruh masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks pengelolaan sampah, keberhasilan program ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana dan sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan strategi, hingga evaluasi pelaksanaan. Misalnya, ketika warga terlibat dalam menentukan lokasi TPS, jadwal pengangkutan, dan mekanisme daur ulang, mereka mengembangkan rasa tanggung jawab kolektif yang kuat. Keterlibatan ini juga memungkinkan munculnya inovasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos, pemanfaatan sampah plastik untuk kerajinan, atau pembentukan bank sampah berbasis komunitas, yang semuanya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program.

Pendekatan partisipatif juga selaras dengan *Collaborative Planning Theory* yang dikembangkan oleh Healey (1997), yang menekankan pentingnya dialog, kesetaraan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Healey menekankan bahwa kualitas interaksi sosial dan kesepahaman antara berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta—lebih menentukan keberhasilan perencanaan daripada sekadar output fisik. Dalam pengelolaan sampah, kolaborasi ini memungkinkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat, karena setiap aktor memiliki peran saling melengkapi: pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai pelaksana utama, LSM sebagai pengawas dan edukator, serta sektor swasta sebagai penyedia inovasi teknologi. Studi kasus di Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah yang melibatkan forum partisipatif masyarakat menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi, efisiensi operasional lebih baik, dan inovasi yang sesuai konteks lokal, misalnya pemilahan sampah di rumah tangga dan pengelolaan kompos komunitas yang berhasil menurunkan volume sampah secara signifikan (Kota Yogyakarta, 2025; Wardah, 2025).

Penelitian empiris mendukung efektivitas pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sampah. Burhanuddin et al. (2024) menemukan bahwa penerapan *community-based waste management* di Kota Surabaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah hingga 40% dibanding sistem konvensional, karena warga aktif menentukan lokasi pengumpulan, jadwal pengangkutan, dan mekanisme pengelolaan bank sampah. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu dalam studi program “Bank Sampah Mandiri” di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada forum partisipatif warga yang menjadi wadah perencanaan dan pengambilan keputusan bersama (Warta, 2023). Dengan kata

lain, keterlibatan masyarakat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas, memperkuat sense of belonging, kesadaran lingkungan, serta potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan sampah menjadi nilai tambah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen sentral dalam strategi pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, sehingga program yang hanya mengandalkan kebijakan top-down tanpa keterlibatan warga cenderung kurang efektif.

Selain itu, teori *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM) menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (Fabricius & Collins, 2007; Lurie & Hibbard, 2008). Menurut teori ini, keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam memungkinkan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kepentingan langsung terhadap kelestarian lingkungan, sehingga keputusan yang diambil lebih realistis, relevan, dan dapat dijalankan secara konsisten. Dalam konteks kawasan padat penduduk, seperti Kampung Pulo di Jakarta atau Kampung Banjarsari di Surabaya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah berbasis komunitas meningkatkan kesadaran lingkungan, menciptakan sistem pengelolaan yang hemat biaya, efisien, dan sesuai dengan karakteristik ruang terbatas. Misalnya, melalui forum musyawarah warga, masyarakat dapat merancang sistem pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 secara tepat, menentukan lokasi TPS mini yang tidak mengganggu estetika permukiman, serta menetapkan jadwal pengangkutan yang fleksibel agar tidak menimbulkan kemacetan atau bau. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CBNRM dapat diterjemahkan ke praktik yang nyata, di mana warga menjadi pelaksana sekaligus pengawas program, sehingga terjadi peningkatan tanggung jawab kolektif, kesadaran ekologis, dan inovasi lokal yang sesuai dengan kondisi setempat.

Studi kasus dari Kota Surabaya menegaskan keberhasilan penerapan perencanaan partisipatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Program Kampung Berseri dan Bank Sampah Induk Surabaya menjadi contoh konkret di mana pemerintah kota memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam merancang dan mengelola sistem pemilahan serta daur ulang sampah (Sabrina, 2025; Satya et al., 2025). Proses ini dijalankan melalui forum musyawarah lingkungan yang melibatkan warga, kader lingkungan, perangkat kelurahan, dan pihak swasta yang memberikan dukungan teknis atau pembiayaan. Dampaknya terlihat jelas, dengan penurunan volume sampah yang masuk ke TPA Benowo hingga 20% setiap tahun sejak 2019 (Redaksi, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menghasilkan manfaat ekonomi, seperti peningkatan pendapatan warga dari penjualan sampah daur ulang, serta manfaat sosial berupa terciptanya budaya bersih, tertib, dan saling mengingatkan antarwarga. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa perencanaan partisipatif memungkinkan integrasi tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan, serta menjadikan masyarakat penggerak utama perubahan yang berkelanjutan di lingkungan mereka sendiri.

Penelitian oleh Nurhadi et al. (2023) di Semarang menegaskan pentingnya perencanaan partisipatif untuk keberhasilan program pengelolaan sampah di tingkat lokal. Studi mereka menemukan bahwa program pengelolaan sampah di Kota Semarang mengalami kegagalan ketika perencanaan dilakukan secara top-down, tanpa melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Ketika program diperbaiki dengan menerapkan forum partisipatif, di mana warga aktif dilibatkan dalam penyusunan strategi pengumpulan, pemilahan, pengolahan, serta penentuan insentif untuk partisipasi, efektivitas pengelolaan meningkat hingga dua kali lipat. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif mampu memperkuat prinsip demokratisasi kebijakan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan akuntabilitas, serta memastikan keberlanjutan program lingkungan. Dengan kata lain, tanpa

partisipasi bermakna dari masyarakat, intervensi pemerintah cenderung kurang optimal, sementara peran warga sebagai pengambil keputusan aktif menjadi kunci untuk menjembatani tujuan kebijakan dengan praktik nyata di lapangan, sehingga program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dari perspektif sosial, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah berperan sangat penting dalam membangun dan memperkuat modal sosial (*social capital*) yang menjadi fondasi keberhasilan program berbasis komunitas. Teori yang dikemukakan oleh Putnam (1994) menekankan bahwa modal sosial terdiri atas kepercayaan antarwarga, jaringan sosial yang terstruktur, serta norma kerja sama yang memfasilitasi interaksi positif dalam masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas inisiatif kolektif. Dalam konteks pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat, modal sosial ini memungkinkan warga untuk saling mengawasi, membantu, dan memotivasi satu sama lain agar program berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya, di beberapa permukiman padat di Semarang, terbentuk kelompok relawan lingkungan yang secara sukarela memberikan pendampingan bagi warga dalam memisahkan sampah organik dan non-organik, sekaligus mengedukasi tetangga tentang prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan pengelolaan sampah rumah tangga (Redaksi SS, 2025). Aktivitas ini memperkuat kepercayaan antarwarga dan solidaritas sosial, yang selanjutnya mendorong terciptanya perilaku kolektif yang mendukung keberlangsungan program. Praktik semacam ini membuktikan bahwa efektivitas pengelolaan sampah bergantung pada kemampuan komunitas membangun jaringan sosial yang kuat, di mana warga secara aktif menjadi agen perubahan, inovator lokal, dan pengawas sekaligus pelaksana program lingkungan.

Dari berbagai hasil penelitian dan teori yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan bahwa perencanaan partisipatif memiliki peran fundamental dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk, serta memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pendekatan ini mampu memperkuat rasa tanggung jawab dan kepemilikan warga terhadap program, meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan potensi lokal, serta mendorong terciptanya inovasi berbasis komunitas, seperti sistem pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan pengembangan bank sampah yang memberi manfaat ekonomi tambahan. Keberhasilan implementasi perencanaan partisipatif tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah yang adaptif, fasilitasi kelembagaan yang kuat, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas warga dalam memahami isu lingkungan dan strategi pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perluasan penerapan model perencanaan partisipatif di berbagai permukiman padat penduduk di Indonesia menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat, membangun budaya peduli lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip partisipatif ini akan menghasilkan efek sinergis jangka panjang, di mana masyarakat menjadi penggerak aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, dan ketahanan sosial-ekonomi komunitas mereka.

Tabel 1. Perencanaan Partisipatif dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Padat Penduduk

No	Tema / Fokus	Teori / Konsep	Temuan Utama	Contoh Kasus / Implementasi	Dampak / Manfaat
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat	<i>Ladder of Citizen Participation</i> (Arnstein, 1969)	Partisipasi masyarakat bervariasi dari manipulasi hingga kontrol penuh;	Warga menentukan lokasi TPS, jadwal pengangkutan,	Meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif, kepatuhan, dan inovasi lokal

			semakin tinggi partisipasi, semakin besar pengaruh terhadap kebijakan	dan mekanisme daur ulang	
2	Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan	<i>Collaborative Planning Theory</i> (Healey, 1997)	Keberhasilan ditentukan kualitas interaksi, dialog, dan kesetaraan antar aktor	Pemerintah, masyarakat, LSM, dan swasta bekerja sama di Jakarta dan Yogyakarta	Sistem pengelolaan sampah lebih adaptif, responsif, dan sesuai kebutuhan lokal
3	Efektivitas Program	Studi empiris (Burhanuddin et al., 2024; Warta, 2023)	Program berbasis komunitas meningkatkan efektivitas hingga 40% dibanding sistem konvensional	Community-based waste management di Surabaya dan Bank Sampah Mandiri Yogyakarta	Kepatuhan tinggi, efisiensi operasional lebih baik, potensi ekonomi lokal dari daur ulang sampah
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas	<i>Community-Based Natural Resource Management</i> (CBNRM) (Fabricius & Collins, 2007; Lurie & Hibbard, 2008)	Keterlibatan masyarakat memanfaatkan pengetahuan lokal, meningkatkan relevansi dan kelestarian program	Forum musyawarah warga Kampung Pulo (Jakarta) dan Kampung Banjarsari (Surabaya)	Sistem hemat biaya, efisien, sesuai ruang terbatas, meningkat tanggung jawab kolektif dan kesadaran ekologis
5	Integrasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	Studi kasus Surabaya (Sabrina, 2025; Satya et al., 2025; Redaksi, 2021)	Partisipasi memungkinkan integrasi multi-dimensi dalam pengelolaan sampah	Program Kampung Berseri dan Bank Sampah Induk Surabaya	Volume sampah berkurang 20%, pendapatan warga meningkat, budaya bersih dan tertib terbentuk
6	Dampak Partisipasi Bermakna	Nurhadi et al., 2023	Perencanaan top-down tanpa warga cenderung gagal; forum partisipatif meningkatkan efektivitas hingga dua kali lipat	Program pengelolaan sampah di Semarang	Demokratisasi kebijakan, efisiensi operasional, akuntabilitas, keberlanjutan program meningkat
7	Pembangunan Modal Sosial	<i>Social Capital Theory</i> (Putnam, 1994)	Partisipasi membangun kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kerja sama	Kelompok relawan lingkungan di Semarang mengedukasi tetangga tentang 3R	Konsistensi program terjaga, solidaritas sosial meningkat, warga menjadi agen perubahan dan inovator lokal
8	Dampak Strategis Perencanaan	Sintesis berbagai penelitian	Partisipasi meningkatkan efektivitas	Penerapan di berbagai permukiman	Sistem pengelolaan sampah inklusif,

Partisipatif	pengelolaan sampah, inovasi lokal, kepemilikan warga, dan kualitas hidup	padat penduduk Indonesia	berkelanjutan, modal sosial diperkuat, budaya peduli lingkungan terbentuk
--------------	--	--------------------------	---

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan permukiman padat penduduk. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan perencanaan—mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi—sehingga menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis 23 artikel yang ditinjau, ditemukan bahwa efektivitas pengelolaan sampah meningkat secara signifikan ketika proses perencanaan melibatkan warga secara inklusif dan kolaboratif, sejalan dengan teori *Ladder of Citizen Participation* dan *Collaborative Planning Theory*. Selain menurunkan volume sampah, partisipasi juga memperkuat modal sosial, mendorong inovasi lokal seperti bank sampah, dan meningkatkan keberlanjutan program lingkungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk ditentukan oleh kualitas hubungan sosial, komunikasi, dan kolaborasi antaraktor yang terbangun melalui proses perencanaan partisipatif.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai perencanaan partisipatif dan tata kelola lingkungan dengan menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini memperluas penerapan teori *Collaborative Planning* dan *Community-Based Resource Management* dalam konteks urban, khususnya di kawasan padat penduduk. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola lingkungan bahwa pendekatan top-down perlu digantikan dengan model perencanaan partisipatif yang berbasis pada kebutuhan lokal dan melibatkan warga sejak tahap awal. Program seperti bank sampah, kampung iklim, dan forum warga akan lebih efektif jika difasilitasi melalui mekanisme partisipasi yang transparan, demokratis, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah tidak dapat dicapai tanpa pemberdayaan masyarakat dan integrasi antara kebijakan publik dengan inovasi komunitas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagai penelitian tinjauan pustaka, analisis yang dilakukan sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang tersedia dalam literatur, sehingga tidak mencakup observasi empiris langsung terhadap praktik di lapangan. Kedua, fokus waktu pengambilan data hanya pada periode 1969–2025, yang meskipun relevan untuk menggambarkan tren terkini, namun mungkin belum cukup untuk menangkap dinamika jangka panjang dari implementasi perencanaan partisipatif di berbagai daerah. Ketiga, sebagian besar literatur yang dianalisis masih berfokus pada konteks perkotaan di Indonesia bagian barat, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keberagaman sosial dan geografis Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, perbedaan metodologi dan terminologi dalam setiap artikel juga dapat memengaruhi konsistensi analisis antar studi.

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang bersifat praktis maupun akademis. Pertama, bagi pemerintah daerah, perlu memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif melalui pembentukan forum lingkungan di tingkat kelurahan dan RW yang dapat menjadi wadah kolaborasi antara warga, pemerintah, dan

sektor swasta. Kedua, bagi lembaga pendidikan dan peneliti, disarankan untuk melakukan studi lapangan lebih mendalam yang mengkaji dampak langsung perencanaan partisipatif terhadap perubahan perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah. Ketiga, bagi masyarakat dan organisasi non-pemerintah, penting untuk memperluas edukasi lingkungan dan pelatihan partisipatif agar masyarakat memiliki kapasitas teknis dan sosial untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Keempat, bagi pembuat kebijakan nasional, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan program pengelolaan sampah. Dengan mengintegrasikan seluruh pihak dalam proses perencanaan yang partisipatif, diharapkan dapat terwujud sistem pengelolaan sampah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan permukiman padat penduduk di Indonesia.

REFERENSI

- Admin. (2023). *KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Jadi Kompos*. Www.Menlhk.Go.Id. <https://www.menlhk.go.id/news/klhk-ajak-masyarakat-kelola-sampah-organik-jadi-kompos>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Burhanuddin, A. D., Yanuwadi, B., & Arisoelaningsih, E. (2024). Evaluating Performance and Sustainability of the Waste Bank in Some Cities in East Java Indonesia. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 15(2), 77–86. <https://doi.org/10.21776/ub.jp.al.2024.015.02.03>
- Dewi, A. I. M., Andina Uyuni Aulia, Afriadin, Sri Uswatun Hasana Mang, Nurul Aulia, Arif Saputra, Lalu Andre Arya P, & Muhamad Hendra. (2025). implementasi prinsip good governance dalam peningkatan efisiensi pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 7(1), 68–81.
- Fabricius, C., & Collins, S. (2007). Community-based natural resource management: governing the commons. *Water Policy*, 9(S2), 83–97. <https://doi.org/10.2166/wp.2007.132>
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395. <https://doi.org/10.63822/vmthgf73>
- Hakim, A. R., & Umar, G. (2025). Model Kolaboratif Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta dalam Mengintegrasikan Tujuan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Daerah. *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, 2(1), 9–22.
- Halimah, M., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2015). partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 147–300. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13272>
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning*. Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-25538-2>
- Indrawati. (2019). partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas (Studi Kasus Bank Sampah Tri Guyup Rukun, Kabupaten Purworejo). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), 51–60.
- Kota Yogyakarta, D. L. H. (2025). *Kota Yogyakarta Serentak “Mas JOS” (Masyarakat Jogja Olah Sampah)*. Lingkunganhidup.Jogjakota.Go.Id. <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/453>
- Lurie, S., & Hibbard, M. (2008). Community-Based Natural Resource Management: Ideals and

-
- Realities for Oregon Watershed Councils. *Society & Natural Resources*, 21(5), 430–440. <https://doi.org/10.1080/08941920801898085>
- Nurhadi, M., Putra, K. I., & Adyatama, A. M. (2023). *Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*. Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI).
- Putnam, R. D. (1994). Social Capital and Public Affairs. *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*, 47(8), 5. <https://doi.org/10.2307/3824796>
- Redaksi. (2021). *Eri Cahyadi: Dengan 3R Sampah yang Masuk ke TPA Benowo Berkurang 20 Persen*. Surabaya Today. <https://www.surabayatoday.id/2021/05/06/eri-cahyadi-dengan-3r-sampah-yang-masuk-ke-tpa-benowo-berkurang-20-persen>
- Redaksi SS. (2025). *Polimarin Sukses Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah*. Semarang Sekarang. <https://semarangsekarang.com/hukum/polimarin-sukses-gelar-edukasi-pengelolaan-sampah>
- Sabrina, A. S. (2025). mekanisme partisipatif pengelolaan sampah oleh kader surabaya hebat (ksh) di kelurahan Mojo Kota Surabaya. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(11), 1–14.
- Satya, A. M., Pratiwi, A. M., & Wardhana, M. F. S. (2025). Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Surabaya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 41–49.
- Setyawati, I. E., Heri, & Wandan, M. R. (2025). Peran Program Kampung Iklim dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. *Jipolis : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1–8.
- Sitoresmi, N. A., & Karmilah, M. (2025). Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Bumi : Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 59–74. <https://doi.org/10.61132/bumi.v3i1.709>
- Tumimomor, A. Y. S., & Lasso, A. H. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Iklim Ngadirejo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 133–148. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2289>
- Wardah, M. (2025). *partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dahlia rw 01 petukangan selatan pesanggrahan jakarta selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Warta, A. (2023). *Forum Bank Sampah Penggerak Perubahan Perilaku Pengurangan Sampah di Masyarakat*. Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/29912>